

# Peran Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asia

Marisa Febrian<sup>1</sup>, Doni Satria<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Korespondensi : [marisafebrian2ap2@gmail.com](mailto:marisafebrian2ap2@gmail.com), [donisatria@fe.unp.ac.id](mailto:donisatria@fe.unp.ac.id)

## Info Artikel

### Diterima:

15 Mei 2025

### Disetujui:

16 Juni 2025

### Terbit daring:

25 Juni 2025

### DOI: -

### Sitasi:

Febrian, M. & Satria, D. (2025). Peran Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Asia

## Abstract:

*This research investigates the impact of governance on economic growth in 47 Asian countries over the period 2013 to 2022. Adopting a quantitative approach, the research relies on secondary data sourced from the World Bank. Panel data regression analysis is employed. The Fixed Effect Model is determined to be the most suitable estimation method. Data analysis is conducted using EViews 13. The results indicate that: (1) Voice and accountability, along with political stability and absence of violence/terrorism, have a significant effect on economic growth. (2) Control variables, specifically foreign direct investment and labor force participation rate, also demonstrate significant influence. (3) Among these, the labor force participation rate consistently shows a strong positive impact on economic growth.*

**Keywords:** Economic Growth, Rule of Law, Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Regulatory Quality.

## Abstrak:

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia selama periode 2013-2022. Jenis penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini dilakukan pada 47 negara Asia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang peneliti dapatkan dari Bank Dunia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Model estimasi regresi data panel yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel suara dan akuntabilitas, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan/ terorisme dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia. (2) Variabel kontrol yaitu penanaman modal asing dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia. Sementara itu, (3) Variabel kontrol yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Supremasi Hukum, Suara dan Akuntabilitas, Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme, Kualitas Regulasi.

Kode Klasifikasi JEL: F43, O47,

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Bank Dunia tahun 2020, perbedaan pendapat antar negara di Asia menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Rata-rata PDB per kapita di Asia adalah 14.4 ribu USD. Namun, terdapat perbedaan mencolok antara negara yang memiliki pendapatan tinggi dengan yang rendah. Misalnya, Singapore memiliki PDB per kapita sebesar 59.144 ribu USD sedangkan Afganistan hanya memiliki PDB per kapita 527 ribu USD (World Bank 2020). Dari sisi total pendapatan nasional di tahun 2020, China adalah negara dengan ukuran perekonomian terbesar di Asia dengan PDB senilai 14,69 triliun USD sedangkan Timor Leste memiliki PDB hanya 2,16 miliar USD (World Bank 2020).

Faktor utama penyebab perbedaan pendapatan nasional tersebut dapat dijelaskan melalui teori pertumbuhan ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akumulasi modal manusia, modal fisik, serta kemajuan teknologi merupakan faktor fundamental dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Acemoglu 2009). Namun, penelitian lain menyoroti bahwa infrastruktur sosial dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Robert E.Hall 1999).

Beberapa model pertumbuhan ekonomi telah memberikan wawasan penting dalam memahami dinamika perkembangan suatu negara. Teori Ekonomi Kelembagaan menurut Douglass C. North menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh efektivitas lembaga formal dan informal dalam menciptakan struktur insentif yang mendorong aktivitas ekonomi yang efisien. Sebaliknya, teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa faktor internal seperti inovasi, investasi dalam pendidikan, serta kebijakan ekonomi yang mendukung merupakan aspek utama dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang (D. Romer 2019). Meskipun kedua teori ini memberikan pemahaman yang bermanfaat, keduanya masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan mengapa tingkat pertumbuhan ekonomi berbeda secara signifikan antar negara.

Dalam konteks Asia, tata kelola pemerintahan merupakan faktor utama yang memengaruhi perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara. Jika dibandingkan dengan kawasan lain, seperti Eropa dan Afrika, tata kelola pemerintahan di Asia memiliki variasi yang cukup besar. Negara-negara di Eropa cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik, ditandai dengan transparansi yang tinggi, pengendalian korupsi yang ketat, serta sistem hukum yang kuat (IDEA 2018). Sebaliknya, beberapa negara di Asia masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan efektif.

Tata kelola pemerintahan yang baik berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan institusi yang kuat. Kejelasan sistem hak kepemilikan, penegakan hukum yang adil, serta stabilitas politik menjadi elemen utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan perdagangan (Rodrik and Subramanian 2003). Selain itu, tata kelola yang berkualitas juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas modal manusia dan fisik dengan menciptakan regulasi yang efektif serta lingkungan investasi yang kondusif. Konsep ini sejalan dengan model pertumbuhan Solow dan teori pertumbuhan endogen, yang menekankan bahwa institusi yang baik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Samarasinghe 2018).

Penelitian ini memiliki tiga kontribusi utama dalam literatur ekonomi. Studi ini meneliti bagaimana tata kelola pemerintahan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Asia dengan menggunakan data panel dari 47 negara selama periode 2013–2022. Variabel kelembagaan seperti kontrol korupsi, supremasi hukum, efektivitas pemerintah, dan stabilitas politik dianalisis dalam konteks Asia yang memiliki sistem kelembagaan yang beragam. Selain itu, penelitian ini menggunakan data dari Worldwide Governance Indicators, yang mencakup empat aspek utama tata kelola: supremasi hukum, ukuran pemerintah, efisiensi regulasi, dan keterbukaan pasar. Studi ini juga menerapkan metode Fixed Effect Model (FEM) untuk menangkap perbedaan karakteristik antar negara, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi perumusan kebijakan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peran kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di kawasan Asia cukup menarik untuk diteliti kembali. Meskipun sudah menjadi konsensus di kalangan ahli ekonomi dan pembangunan bahwa peran kelembagaan dan tata kelola pemerintah memiliki peran besar untuk pertumbuhan ekonomi, namun kasus di China dengan tingkat demokrasi yang rendah dan tata kelola pemerintahan yang tidak ideal dalam perspective negara maju, mampu untuk bisa tumbuh dengan pesat dalam tiga dasawarsa terakhir. Bahkan Tiongkok mampu menjadi sebuah kekuatan ekonomi besar di Dunia setelah USA, Jepang dan Uni Eropa. Contoh lain negara yang kurang ideal sistem tata kelola pemerintahan dan kelembagaannya adalah India dan Rusia. Kedua negara tersebut juga mampu memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif baik dan stabil dalam dua dasawarsa terakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang peran penting kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia. Dengan demikian penelitian ini akan berkontribusi terhadap faktor kelembagaan utama apa yang paling penting dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Asia.

Pada bagian selanjutnya penelitian ini akan menjelaskan tinjauan literatur, data dan metodologi analisis, hasil temuan penelitian dan diskusi hasil temuan tersebut. Pada bagian akhir artikel ini, kami akan memberikan catatan penutup sebagai kesimpulan dari analisis yang kami lakukan pada penelitian ini.

## Tinjauan pustaka

### 1.1. Tata kelola Pemerintahan dan teori pertumbuhan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci utama dalam menciptakan stabilitas dan efektivitas suatu negara, terutama dalam memastikan partisipasi publik, akuntabilitas, serta transparansi dalam berbagai aspek pemerintahan. Menurut Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2010), tata kelola yang berkualitas mencakup partisipasi publik dan akuntabilitas (*Voice and Accountability*), stabilitas politik serta ketiadaan kekerasan atau terorisme (*Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*), efektivitas pemerintahan (*Government Effectiveness*), kualitas regulasi (*Regulatory Quality*), supremasi hukum (*Rule of Law*), serta pengendalian korupsi (*Control of Corruption*) (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010a). Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara optimal, institusi-institusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan berkembang lebih baik, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan investasi.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, peran kelembagaan menjadi fokus penting dalam menjelaskan dinamika pembangunan jangka panjang. Douglass C. North (1990) melalui Teori Ekonomi Kelembagaan menegaskan bahwa institusi baik formal maupun informal membentuk struktur insentif yang memengaruhi kinerja ekonomi, dan karenanya merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen, seperti yang dikemukakan oleh (P. Romer 1994) yang menempatkan inovasi, pengetahuan, dan kebijakan sebagai faktor internal yang dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan. Namun demikian, (Robert J. Barro 2004) menunjukkan bahwa meskipun institusi penting, teori-teori tersebut belum sepenuhnya menjelaskan adanya kesenjangan pertumbuhan antarwilayah, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain seperti infrastruktur sosial dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, (Acemoglu, Johnson, and Robinson 2012) menekankan bahwa institusi ekonomi dan politik yang inklusif, serta tata kelola yang baik, merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

### 1.2. Hubungan teoritis antara tata kelola dan pertumbuhan ekonomi

Kaufmann dan Kraay (2002) menunjukkan adanya hubungan kuat antara kualitas tata kelola dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan yang baik tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menciptakan stabilitas dan lingkungan yang mendukung investasi serta inovasi. Pertumbuhan yang berkelanjutan pun berkontribusi pada peningkatan tata kelola melalui penguatan institusi dan kebijakan yang lebih efektif (Kaufmann and Kraay 2002), (Emara and Jhonsa 2014). Penelitian lain menegaskan bahwa institusi yang kuat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi jangka (North 1991), (Greif 1994), (Acemoglu 2012, Acemoglu and Robinson 2010), serta (Rodrik and Subramanian 2003). Kepastian hukum, penegakan kontrak, serta kebijakan yang adil dan transparan membentuk fondasi ekonomi yang stabil. Ditambah dengan akses informasi yang merata dan stabilitas makroekonomi, tata kelola yang baik memperkuat kepercayaan pasar, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

### 1.3. Suara dan akuntabilitas terhadap pertumbuhan ekonomi

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda, mulai dari demokrasi, otoritarianisme, hingga bentuk hibrida yang menggabungkan unsur keduanya. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi elemen utama dalam pemilihan pemimpin dan penyusunan kebijakan publik. Suara dan akuntabilitas tidak hanya mencerminkan keterlibatan warga dalam pemerintahan, tetapi juga berhubungan erat dengan transparansi serta akuntabilitas politik. Negara dengan tata kelola demokratis yang kuat cenderung memiliki mekanisme *checks and balances* yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Sirowy and Inkeles 1990).

Sejumlah penelitian telah berupaya mengevaluasi hubungan antara tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. (Widjanarko 2021) meneliti dampak enam variabel *Good Governance*, termasuk suara dan akuntabilitas, terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat serta stabilitas politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian lain oleh (Muhammad Isbad Addainuri, Maulana Abidin 2023) menemukan bahwa suara dan akuntabilitas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menentukan kebijakan publik meningkat, hal tersebut tidak serta-merta berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

#### **1.4. Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan atau terorisme mencerminkan sejauh mana suatu negara mampu menjaga kondisi politik yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan bermotif politik, termasuk aksi terorisme (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010a). Indikator ini berperan penting dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rezim demokrasi dan sistem multipartai dapat berkontribusi terhadap ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Younis et al. 2008). Keberhasilan ekonomi Tiongkok sering dikaitkan dengan sistem politik satu partai yang memungkinkan tingkat stabilitas politik yang tinggi. Sebaliknya, kompleksitas sistem multipartai dan meningkatnya tingkat demokrasi di India dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat pertumbuhannya (Younis et al. 2008). Namun, tidak semua penelitian menunjukkan kesimpulan yang serupa. (Pere 2015) menemukan bahwa stabilitas politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, menjaga stabilitas politik menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan mampu menarik investasi jangka panjang.

#### **1.5. Kualitas regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi**

Kualitas regulasi mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu merancang dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pengembangan sektor swasta (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010a). Sebagai salah satu aspek utama dalam tata kelola pemerintahan, kualitas regulasi berperan dalam memoderasi dampak pembangunan ekonomi.

Efektivitas regulasi berperan penting dalam mendorong sektor swasta dan menciptakan pasar yang kompetitif. Regulasi yang jelas, sederhana, dan konsisten mempermudah aktivitas bisnis, mendorong investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, regulasi yang rumit dan tidak stabil dapat menghambat dunia usaha dan meningkatkan risiko krisis keuangan, terutama di negara dengan regulasi longgar (Mawardi et al. 2024).

Peningkatan kualitas tata kelola melalui regulasi efisien, ukuran pemerintah yang optimal, penegakan hukum, dan pasar terbuka terbukti positif bagi pertumbuhan ekonomi (Mawardi et al. 2024). Regulasi yang lemah justru menimbulkan ketidakpastian hukum, birokrasi lamban, serta risiko korupsi, yang menjadi hambatan bagi investor. Negara dengan lembaga regulasi yang tidak efektif juga cenderung lambat dalam implementasi kebijakan, menghambat pertumbuhan berkelanjutan (Lyulyov et al. 2021). Oleh karena itu, kualitas regulasi menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Deskripsi data**

Penelitian ini menggunakan data dari Bank Dunia. Data yang relevan dengan indikator tata kelola pemerintahan (Suara dan Akuntabilitas, Stabilitas Politik dan Ketiadaan

Kekerasan/Terrorisme, Kualitas Regulasi) dikumpulkan dari database indikator tata kelola Bank Dunia . Penelitian ini menggunakan data dari 47 negara selama periode 10 tahun. Ada tiga variabel tata kelola dan tiga variabel kontrol dalam penelitian ini. Statistik deskriptif penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1;

**Tabel 1. Statistik Dekriptif Variabel Tata Kelola dan Variabel kontrol**

Variabel	Mean	S. Deviasi	Min	Max
Pertumbuhan Ekonomi	8,65	1,27	5,93	11,24
Suara dan akuntabilitas	29,49	21,43	0,00	84,98
Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme	36,82	26,42	0,00	99,05
Kualitas regulasi	44,70	26,47	0,48	100,00
Penanaman Modal Asing	4,61	18,09	-103,16	222,76
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	38,72	10,38	10,38	71,16
Pengguna Internet	57,18	29,61	0,00	100,00

**Tabel 2. Perubahan rata-rata variabel dari waktu ke waktu**

Tahun	Variabel			
	Pertumbuhan Ekonomi	Suara dan Akuntabilitas	Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme	Kualitas Regulasi
2013	8,58	29,35	35,10	43,89
2014	8,60	29,22	37,36	44,27
2015	8,61	29,22	35,71	44,09
2016	8,63	29,63	36,47	44,73
2017	8,64	29,64	37,19	45,32
2018	8,67	29,83	37,27	44,76
2019	8,71	29,64	37,68	45,19
2020	8,65	29,42	37,30	45,60
2021	8,69	29,31	36,58	45,10
2022	8,71	29,63	37,53	44,05

### Variabel tata kelola pemerintahan

Indikator tata kelola pemerintahan yang sering digunakan dalam kajian ekonomi dan pembangunan dikenal dengan nama Worldwide Governance Indicators (WGI). Indikator ini dikembangkan oleh Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi di bawah naungan Bank Dunia (Kaufmann and Kraay 2002). WGI terdiri dari enam dimensi, namun dalam penelitian ini fokus diberikan pada tiga variabel utama sebagai penjelas tata kelola pemerintahan, yaitu Suara dan Akuntabilitas (Voice and Accountability), Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism), serta Kualitas Regulasi (Regulatory Quality). Ketiga variabel ini dipilih karena menghindari masalah multikolinearitas yang umum terjadi ketika menggunakan keseluruhan indikator WGI sekaligus (Samarasinghe 2018).

### Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah logaritma PDB per kapita konstan 2015 dalam satuan USD. PDB per kapita dipilih sebagai indikator kesejahteraan ekonomi karena mencerminkan rata-rata pendapatan individu dalam suatu wilayah.

### Variabel kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi Penanaman Modal Asing net inflows (% of GDP), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk usia 15-24 tahun (%), dan pengguna internet (% dari populasi). Ketiga variabel ini dikontrol agar hubungan antara tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi tetap valid dengan mempertimbangkan faktor eksternal yang juga memengaruhi perkembangan ekonomi di Asia.

## 2. Pengambilan sampel

Penelitian ini mencakup 47 negara Asia. Pemilihan 47 negara dalam penelitian ini didasarkan pada ketersediaan data serta relevansi dengan tujuan penelitian yang berfokus pada hubungan antara tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang dipilih berasal dari kawasan Asia dan Timur Tengah, yang memiliki variasi sistem politik dan tingkat pembangunan ekonomi yang luas. Keberagaman ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. (Miao et al. 2023).

## 3. Model ekonometrika

Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan pendekatan regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di 47 negara Asia.

Secara matematis, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln gdp_{it} = \beta_1 sa_{it} + \beta_2 sk_{it} + \beta_3 kr_{it} + \beta_4 pma_{it} + \beta_5 tpa_{it} + \beta_6 pi_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Untuk memastikan pemilihan model yang paling sesuai, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan estimasi, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Uji pemilihan model dilakukan melalui serangkaian pengujian, seperti *uji Chow* untuk membandingkan CEM dengan FEM, *uji Hausman* untuk menentukan apakah FEM atau REM lebih tepat, serta *uji Breusch-Pagan* untuk mengonfirmasi keberlakuan REM.

## HASIL DAN ANALISIS

### Uji pemilihan model

#### Uji chow

Berdasarkan hasil uji chow, didapat bahwa probabilitasnya sebesar 0.0000. Dari hasil tersebut tampak bahwa nilai probabilitasnya <0.05, hal ini berarti bahwa model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Oleh sebab itu, Langkah selanjutnya perlu adanya uji hausman.

#### Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji hausman, didapat bahwa probabilitasnya sebesar 0.000. Dari hasil tersebut tampak bahwa nilai probabilitasnya <0.05, hal ini berarti bahwa model yang terpilih adalah *fixed effect model*.

### Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan uji pemilihan model, model yang terpilih adalah metode dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM), sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel**

Variabel	Coefficient	Std.eror	t-statistic	Prob
Constanta	8.1826	0.0298	273.9740	0.0000
Suara dan Akuntabilitas	0.0032	0.0007	4.1996	0.0000
Stabilitas Politik dan Tidak Adanya Kekerasan/Terrorisme	0.0014	0.0004	2.9473	0.0034

Kualitas Regulasi	0.0033	0.0005	6.5578	0.0000
Penanaman Modal Asing	-0.0003	0.0002	-1.3338	0.1830
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-9.2807	2.0100	-0.4615	0.6446
Pengguna Internet	0.0030	0.0001	15.4987	0.0000
R-Squared	0.9985			
F-Statistic	5592.261			
Prob (F-statistic)	0.000000			
Total observations	470			

Sumber: *Eviews 13, 2025*

### Analisis Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 47 negara Asia. Dengan menggunakan regresi data panel, ditemukan bahwa indikator utama tata kelola, yakni sura dan akuntabilitas, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme, dan kualitas regulasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia.

Suara dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik serta menyuarakan kepentingannya secara bebas. Partisipasi ini mendorong pemerintah untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan publik. Ketika aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik, kepercayaan terhadap institusi negara meningkat, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan politik yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.

Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan mendorong aliran modal ke dalam negeri. Namun, stabilitas politik yang bersifat represif atau diperoleh melalui kontrol yang ketat terhadap oposisi dapat menghambat dinamika pasar dan mengurangi fleksibilitas kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas politik yang sehat harus didukung oleh sistem demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan ekonomi.

Kualitas regulasi menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa regulasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pasar dan mendorong aktivitas bisnis. Namun, dampak dari regulasi sangat bergantung pada kualitas implementasi dan kepatuhan hukum di masing-masing negara. Regulasi yang kompleks dan birokratis dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Temuan penelitian ini selaras dengan studi sebelumnya yang menegaskan pentingnya tata kelola dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh (Linawati, Suzantia, and Wibowo 2021) menunjukkan bahwa suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, dan kualitas regulasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang anggota OKI. Hasil tersebut sejalan dengan temuan dalam skripsi ini, di mana ketiga indikator tata kelola tersebut terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia. Selain itu, penelitian oleh (Saidi and Ochi 2023) menyoroti bahwa kualitas tata kelola menjadi prasyarat penting agar investasi asing berdampak pada pertumbuhan, menunjukkan bahwa governance memainkan peran moderasi dalam sistem ekonomi. Penelitian oleh (Muhammad Isbad Addainuri, Maulana Abidin 2023) juga memperkuat bahwa efektivitas pemerintah dan rule of law sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan di kawasan ASEAN. Kesamaan hasil temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi regulasi, stabilitas, maupun partisipasi masyarakat, merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan di negara-negara Asia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan memiliki peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Suara dan Akuntabilitas, Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme, serta Kualitas Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Teori Ekonomi Kelembagaan yang dikemukakan oleh Douglass C. Variabel suara dan akuntabilitas, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme dan kualitas regulasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan, sejalan dengan teori kelembagaan yang menyatakan bahwa institusi kuat mengurangi ketidakpastian dan mendorong investasi (North 1991) dan (Acemoglu and Robinson 2010). Suara dan akuntabilitas sebagai indikator partisipasi politik dan pengawasan publik berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat ((Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010) , stabilitas politik mendukung konsistensi kebijakan (Rodrik and Subramanian 2003) dan kualitas regulasi mempercepat efisiensi serta inovasi pasar (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010) Variabel pengendalian korupsi, efektifitas pemerintah dan aturan hukum dikeluarkan karena multikolinearitas dengan variabel lain yang lebih representatif, yakni *Regulatory Quality* (Samarasinghe 2018).

Secara keseluruhan, suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, dan regulasi yang efektif menjadi kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Asia. Reformasi kelembagaan di ketiga aspek ini dapat mempercepat pembangunan kawasan secara signifikan.

## REFERENSI

- Acemoglu, Daron. 2009. "Introduction to Economic Growth." *Journal of Economic Theory* 147 (2): 545–50. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2012.01.023>.
- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. 2012. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation: Reply." *American Economic Review* 102 (6): 3077–3110. <https://doi.org/10.1257/aer.102.6.3077>.
- Acemoglu, Daron, and James Robinson. 2010. *The Role of Institutions in Growth and Development*. *Review of Economics and Institutions*. Vol. 1. <https://doi.org/10.5202/rei.v1i2.1>.
- Acemoglu, Daron dan James A Robinson. 2012. *Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, Dan Kemiskinan*.
- Emara, Noha, and Eric Jhonsa. 2014. "Governance and Economic Growth: Interpretations for MENA Countries." *Topics in Middle E Astern and African Economies* 16 (2): 164–83.
- Greif, A. 1994. "Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies." *Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1086/261959>.
- IDEA, International. 2018. *Ikhtisar: Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*. *Ikhtisar: Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*. <https://doi.org/10.31752/idea.2018.55>.
- Kaufmann, Daniel, and Aart Kraay. 2002. "Growth without Governance." *Economía* 3 (1): 169–229. <https://doi.org/10.1353/eco.2002.0016>.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. 2010a. "Methodology and Analytical Issues." *Policy Research Working Paper* 3 (2): 220–46. <http://ow.ly/JaiU5oqDu1Z>.
- . 2010b. "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues." *Hague Journal on the Rule of Law* 3 (2): 220–46. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>.
- Linawati, Yuliasti, Herlina Suzantia, and Muhammad Ghafur Wibowo. 2021. "Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI." *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 4 (2): 133–44. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12547>.
- Lyulyov, Oleksii, Tetyana Pimonenko, Aleksy Kwilinski, Henryk Dzwigol, Mariola Dzwigol-

- Barosz, Vladyslav Pavlyk, and Piotr Barosz. 2021. "The Impact of the Government Policy on the Energy Efficient Gap: The Evidence from Ukraine." *Energies* 14 (2): 1–13. <https://doi.org/10.3390/en14020373>.
- Mawardi, Imron, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Tika Widiastuti, and Mohammad Ghozali. 2024. "The Influence of Institutional Quality, Economic Freedom, and Technological Development on Islamic Financial Development in OIC Countries." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 10 (2): 100279. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100279>.
- Miao, Deyo, Samreen Gillani, Hafiz Syed Mohsin Abbas, and Hongfeng Zhan. 2023. "Do Institutional Governance and State Fragility Affect Institutional Quality in Asian Economies?" *Heliyon* 9 (4): e15467. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15467>.
- Muhammad Isbad Addainuri, Maulana Abidin, Lestari Etika Suci. 2023. "Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Asean." *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 14 (2): 155–72. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.400>.
- North, Douglass C. 1991. "Douglass C. North" 5 (1): 97–112.
- Pere, Engjell. 2015. "The Impact of Good Governance in the Economic Development of Western Balkan Countries." *European Journal of Government and Economics* 4 (1): 25–45. <https://doi.org/10.17979/ejge.2015.4.1.4305>.
- Robert E. Hall, Charles I. Jones. 1999. "Why Do Some Countries Produce so Much More Output per Worker than Others." *The Quarterly Journal of Economics* 114 (1): 1–51.
- Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin. 2004. *Economic Growth. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.71057-9>.
- Rodrik, Dani, and Arvind Subramanian. 2003. "The Primacy of Institutions (and What This Does and Does Not Mean)." *Finance and Development* 40 (2): 31–34.
- Romer, David. 2019. *Advanced Macroeconomics (Fifth Edition)*. McGraw Hill.
- Romer, Paul. 1994. "The Origins of Endogenous Growth." *A Macroeconomics Reader* 8 (1): 3–22. <https://doi.org/10.4324/9780203443965.ch26>.
- Saidi, Yosra, and Anis Ochi. 2023. "Estimating Relationships among Foreign Direct Investment, Governance Quality, and Economic Growth in Developing Countries Using the Threshold Auto-Regressive Model." *Regional Science Policy and Practice* 15 (2): 403–24. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12654>.
- Samarasinghe, Tharanga. 2018. "Impact of Governance on Economic Growth Samarasinghe, Tharanga." *Munich Personal RePEc Archive*, no. 89834.
- Sirowy, Larry, and Alex Inkeles. 1990. "The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review." *Studies In Comparative International Development* 25 (1): 126–57. <https://doi.org/10.1007/BF02716908>.
- Widjanarko. 2021. "Analisis Hubungan Good Governance Dan Pertumbuhan." *Jurnal Good Governance* 17 (2): 155–68.
- World Bank. 2020. "Supporting Countries in Unprecedented Times: Annual Report 2020." *World Bank Group*, 1–96.
- Younis, Muhammad, Xu Xiao Lin, Yahya Sharahili, and Santhirasegaram Selvarathinam. 2008. "Political Stability and Economic Growth in Asia." *American Journal of Applied Sciences* 5 (3): 203–8. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2008.203.208>.